

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan nasional, keberhasilan suatu negara seringkali diukur melalui parameter pertumbuhan ekonomi. Indikator ini menjadi acuan penting karena mencerminkan adanya kenaikan aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan produksi barang maupun jasa. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Namun, kenaikan angka tersebut tidak secara otomatis menjamin distribusi kesejahteraan yang adil. Di Indonesia, tantangan nyata justru terletak pada masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang seringkali menjadi ganjalan dalam proses pembangunan (Alvinda et al., 2025). Ketimpangan pendapatan bukan sekadar masalah sosial, melainkan juga hambatan struktural bagi kemajuan ekonomi. Hubungan antara keduanya bersifat multidimensi, di mana ketimpangan yang tinggi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur. Menurut Sijabat (2024), hal ini terjadi karena daya beli masyarakat cenderung menurun dan investasi dalam modal manusia menjadi tidak optimal. Lebih jauh lagi, kondisi ini seringkali memicu ketidakstabilan dalam aspek sosial maupun politik. Jika akses terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan dan pendidikan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, maka potensi pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang akan terhambat karena kualitas sumber daya manusia yang tidak merata.

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pendapatan, karena peningkatan aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang berbeda antar kelompok masyarakat maupun antar sektor ekonomi. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pada tahap awal pembangunan dapat disertai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan (Dogan & Aslan, 2023). Hal tersebut sejalan dengan hipotesis Kuznets yang menjelaskan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk U terbalik.

Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat seiring dengan proses transformasi struktural dan pergeseran aktivitas ekonomi, sedangkan setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu, ketimpangan cenderung menurun. Dengan demikian, ketimpangan yang relatif tinggi dapat ditemukan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahap tertentu dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat negatif, sehingga penting untuk menguji hubungan keduanya secara empiris.

Selain ketimpangan pendapatan, kemiskinan juga memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara langsung mengurangi kemiskinan apabila manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Suatu wilayah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, tetapi pada saat yang sama masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi apabila pertumbuhan tersebut lebih banyak terkonsentrasi pada sektor atau kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat berlangsung secara bersamaan dan hubungan keduanya tidak selalu dapat dijelaskan melalui hubungan satu arah. Oleh karena itu, hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan karakteristik perekonomian daerah serta keterkaitannya dengan variabel pembangunan lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan adalah tiga indikator utama yang saling berhubungan dalam menilai suksesnya pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Ketiga faktor ini berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai elemen lainnya seperti kualitas demokrasi, pembangunan sumber daya manusia, serta kondisi makro ekonomi yang dinyatakan dalam *Misery Index*. Inflasi dan pengangguran kemudian dikombinasikan dalam satu indikator yang dikenal sebagai *Misery Index*, yang diperkenalkan oleh Arthur Okun untuk mengukur tingkat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika nilai inflasi dan pengangguran semakin tinggi, maka

“penderita ekonomi” masyarakat juga akan meninggi (Okun, 1971). Penelitian empiris menjelaskan bahwa kombinasi inflasi dan pengangguran dapat berdampak negatif kepada tingkat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Tella et al (2013) yang mengatakan bahwa peningkatan inflasi dan pengangguran secara bersamaan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Keterkaitan yang rumit antara variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi tidak selalu terkait dengan penurunan ketimpangan dan kemiskinan, sehingga dibutuhkan pendekatan analisis yang lebih menyeluruh untuk memahami dinamika ini secara keseluruhan.

Selain *Misery Index*, rasio kemiskinan juga merupakan indikator penting dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang mencerminkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama seperti pangan, busana, akomodasi, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan ketidakberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan yang adil, menghalangi pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya produktivitas individu, dan mempersempit akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi (Simanjuntak et al., 2025). Penelitian oleh Nasution et al. (2020) tentang efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di Sumatera Utara, Indonesia, menguatkan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya apabila tidak disertai dengan inklusivitas (pemerataan akses dan kesempatan) tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Tingkat kemiskinan di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, melainkan juga oleh tata kelola demokrasi. Sistem demokrasi yang efektif memperkuat pengawasan publik, akuntabilitas pemerintah, serta partisipasi warga. Hal ini memicu lahirnya berbagai kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (Putri & Triani, 2021). Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan memastikan alokasi pembangunan lebih memprioritaskan masyarakat rentan. Secara tidak langsung, iklim demokrasi yang kondusif ini membentuk tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap peningkatan kesejahteraan, sehingga mampu mendorong penurunan angka kemiskinan (Purba & Hariyadi, 2023). Selain itu, Sen (2015) menegaskan bahwa

kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan akses politik dan lemahnya praktik demokrasi. Ketika demokrasi tidak berfungsi dengan baik, angka kemiskinan cenderung memburuk. Sebaliknya, terdapat hubungan negatif di antara keduanya, di mana penguatan pelaksanaan demokrasi secara efektif mampu mereduksi jumlah penduduk miskin. Temuan tersebut memperkuat penelitian Gao dan Zang (2021) yang menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan, perluasan kebebasan berpendapat, serta pemenuhan hak-hak politik berkontribusi signifikan dalam mereduksi angka kemiskinan. Berlandaskan pemikiran ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diintegrasikan sebagai salah satu variabel eksogen untuk menguji keterkaitannya dengan tingkat kemiskinan, sebagaimana yang diterapkan dalam studi Dogan & Aslan (2023).

Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan karakteristik negara berkembang yang rentan terhadap perubahan global. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2024), setelah tumbuh positif pada 2019, ekonomi nasional sempat mengalami kontraksi hingga -2,07% akibat pandemi di tahun 2020. Upaya pemulihan mulai membuahkan hasil sejak 2021 dengan pertumbuhan 3,7% dan terus menguat ke angka 5%. Disparitas ekonomi antar wilayah juga terlihat jelas pada data PDRB, di mana terdapat jarak yang lebar antara pertumbuhan pesat di Indonesia Timur pada 2015 dengan perlambatan di Pulau Jawa saat pandemi 2020. Bersamaan dengan itu, tren positif pada indeks pembangunan manusia masih dibayangi oleh angka ketimpangan pendapatan yang berfluktuasi. Kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum juga terus bergerak mengikuti dinamika pada indikator inflasi, pengangguran, serta angka kemiskinan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya merata. Lebih jauh lagi, realitas empiris menunjukkan bahwa fenomena ekonomi yang terjadi tidaklah bergerak searah (linear), melainkan memiliki karakteristik hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara simultan. Sebagai contoh, kualitas demokrasi yang baik dapat menciptakan stabilitas politik, memperkuat kualitas institusi, serta meningkatkan transparansi kebijakan publik sehingga mampu mendorong investasi dan aktivitas

ekonomi produktif. Melalui jalur tersebut, demokrasi kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pembangunan manusia yang baik juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menyediakan ruang fiskal bagi penguatan institusi demokrasi dan investasi modal manusia. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dimana ketimpangan yang tinggi tersebut pada gilirannya akan berbalik menekan roda pertumbuhan ekonomi dan merusak stabilitas demokrasi melalui peningkatan ketegangan sosial.

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan memiliki keterkaitan dinamis yang saling mempengaruhi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memperkecil jurang ketimpangan maupun menekan angka kemiskinan jika distribusinya tidak merata, sementara tingkat ketimpangan dan kemiskinan itu sendiri turut mempengaruhi corak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Mengingat interaksi antar variabel ini berlangsung secara dua arah dan timbal balik, penggunaan model persamaan simultan menjadi pendekatan yang tepat untuk menganalisis kompleksitas hubungan ketiganya secara bersamaan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih menganalisis hubungan antar variabel tersebut secara parsial, satu arah, atau hanya berfokus pada pemodelan tunggal terpisah. Pendekatan satu arah (parsial) tersebut secara ekonometrika mengasumsikan bahwa variabel independen di sisi kanan bersifat eksogen murni. Asumsi ini melanggar realitas ekonomi makro dan memicu masalah endogenitas (*simultaneity bias*), yang membuat hasil estimasi regresi linier tunggal menjadi bias dan tidak konsisten karena model-model tersebut saling bertabrakan. Sejalan dengan keterbatasan tersebut, penelitian dari Dogan dan Aslan (2023) telah mencoba mengkaji hubungan antara perkembangan ekonomi, ketidakmerataan penghasilan, dan kemiskinan secara lebih komprehensif.

Oleh karena itu, untuk menjembatani celah penelitian (research gap) dan menyelesaikan masalah endogenitas tersebut, penelitian ini mengintegrasikan seluruh variabel ke dalam satu kesatuan Sistem Persamaan Simultan 3 Persamaan Struktural dengan menambahkan dimensi kualitas demokrasi, pembangunan

manusia, dan tekanan ekonomi (*Misery Index*) dalam konteks data panel wilayah di Indonesia periode 2011–2024. Melalui metode *Two-Stage Least Squares* (2SLS), penelitian ini tidak lagi melihat hubungan secara satu arah, melainkan mengurai benang kusut hubungan timbal balik segitiga antar variabel secara utuh. Melalui pendekatan tersebut, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan perspektif dan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat serta realistis bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan *Misery indeks* terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia periode 2011–2024 dengan menggunakan pendekatan model persamaan simultan (*Simultaneous Equation Model/SEM*) dan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan *Misery Index* terhadap ketimpangan pendapatan. Serta pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kualitas demokrasi, pembangunan manusia, dan tekanan ekonomi melalui *Misery Index* mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Dari sisi ilmu pengetahuan (teoritis), kajian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan saling mempengaruhi jika dilihat bersama faktor politik dan sosial. Peneliti lain juga dapat menggunakan model simultan dalam studi ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang program ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka ekonomi saja, tetapi juga mampu menekan angka pengangguran, mengontrol inflasi, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan oleh masyarakat miskin.

